



Analysis of the Pematang Siantar City Government's Financial Report From the Perspective of Government Accounting Standards

Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematang Siantar Ditinjau Dari Standar Akuntansi Pemerintah

Gress Sitompul¹⁾; Irawan²⁾; Dito Aditia Darma³⁾; Ayu Kuria Sari⁴⁾

^{1,2)} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: 1gracesitompul218@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [27 Maret 2026]

Revised [29 April 2026]

Accepted [30 April 2026]

KEYWORDS

Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan Daerah, Efektivitas, Efisiensi, Kemandirian Fiskal.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laporan keuangan Pemerintah Kota Pematang Siantar periode 2020–2024 ditinjau dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta menilai kinerja keuangan daerah melalui rasio efektivitas, efisiensi, dan kemandirian fiskal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pematang Siantar tahun 2020–2024. Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis rasio keuangan daerah dan analisis kesesuaian penyajian laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAP pada Pemerintah Kota Pematang Siantar secara umum telah dilaksanakan sesuai ketentuan, namun masih terdapat beberapa kelemahan dalam aspek efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan fluktuasi dan cenderung menurun pada tahun tertentu, sedangkan tingkat efisiensi belanja daerah masih belum optimal. Selain itu, tingkat kemandirian fiskal daerah masih tergolong rendah yang mencerminkan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah.

ABSTRACT

This study aims to analyze the financial statements of the Pematang Siantar City Government for the 2020–2024 period in terms of the application of Government Accounting Standards (SAP) and assess regional financial performance through effectiveness, efficiency, and fiscal independence ratios. This study uses a quantitative descriptive approach with secondary data in the form of the Pematang Siantar City Regional Government Financial Report (LKPD) for 2020–2024. Data analysis techniques used include regional financial ratio analysis and analysis of the suitability of financial statement presentation based on Government Regulation No. 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards. The results of the study indicate that the implementation of SAP in the Pematang Siantar City Government has generally been carried out in accordance with the provisions, but there are still several weaknesses in the aspects of effectiveness and efficiency of regional financial management. The level of effectiveness of Regional Original Revenue (PAD) shows fluctuations and tends to decrease in certain years, while the level of regional spending efficiency is still not optimal. In addition, the level of regional fiscal independence is still relatively low, reflecting a high dependence on transfer funds from the central government. This study is expected to serve as evaluation material for regional governments in improving the quality of financial management as well as the transparency and accountability of regional financial reports. Keywords: Government Accounting Standards, Regional Financial Statements, Effectiveness, Efficiency, Fiscal Independence.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah daerah memiliki kewajiban menyusun dan menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik. Untuk menjamin kualitas laporan keuangan tersebut, pemerintah menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pedoman utama dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sektor publik. Penerapan SAP diharapkan mampu menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan. Standar Akuntansi Pemerintah merupakan pedoman dan prinsip-prinsip akuntansi dalam Menyusun dan menyajikan laporan keuangan Diterapkan dilingkungan pemerintah pusat dan dapertemennya maupun daerah dan dinas-dinasnya. SAP berguna bagi penyusunan laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak diluar instansi. PP No. 71 Tahun 2010. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 merupakan SKPD dalam lingkungan pemerintah yang tugasnya memberikan

pelayanan yang tidak berorientasi pada keuntungan. BLUD wajib menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang diatur dalam Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 ataupun Permendagri Nomor 79 Tahun 2018. BLUD diwajibkan memenuhi tugasnya dalam menyelenggarakan pelayanan terutama layanan kesehatan. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 tahun 2018 merupakan pedoman teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Kota Pematang Siantar sebagai salah satu pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama pada periode pascapandemi COVID-19. Fluktuasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingginya ketergantungan terhadap dana transfer, serta terjadinya defisit anggaran pada beberapa tahun menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kinerja keuangan daerah. Analisis laporan keuangan daerah menjadi penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya keuangannya secara efektif dan efisien serta patuh terhadap ketentuan SAP.

Penelitian Miswati Gultom, Nurlina, dan Hasniati (2020) berjudul “Analisis Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pematangsiantar” bertujuan menilai kinerja keuangan daerah melalui empat indikator, yaitu pertumbuhan, efektivitas, efisiensi, dan rasio pajak daerah. Menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2015–2019, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD Kota Pematangsiantar berfluktuasi dengan rata-rata 5,32% per tahun. Tingkat efektivitas penerimaan PAD tergolong sangat efektif dengan rata-rata 103,83%, sedangkan efisiensi pengelolaan PAD berada pada tingkat cukup efisien sebesar 90,45%. Penelitian juga menemukan bahwa pajak daerah menjadi penyumbang terbesar PAD, dengan rata-rata kontribusi 67,18% per tahun (Gultom et al., 2020). Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menitikberatkan pada analisis laporan keuangan Pemerintah Kota Pematang Siantar periode 2020–2024 yang ditinjau berdasarkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penelitian ini tidak hanya menganalisis tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga mengkaji efisiensi pengelolaan anggaran daerah secara keseluruhan, termasuk hubungan antara realisasi pendapatan, belanja, dan surplus/defisit anggaran.

LANDASAN TEORI

Teori Stewardship Teori stewardship memandang pemerintah sebagai pihak yang dipercaya (steward) untuk mengelola sumber daya publik demi kepentingan masyarakat. Dalam konteks sektor publik, teori ini menekankan pentingnya tanggung jawab moral dan profesional aparatur pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Penerapan SAP merupakan bentuk nyata dari perilaku stewardship dalam memenuhi tuntutan akuntabilitas public. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan keuangan disusun berdasarkan SAP sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 dan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL, dan Catatan atas Laporan Keuangan

Teori ini memandang bahwa pemerintah sebagai pengelola keuangan publik (steward) memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk mengelola sumber daya daerah secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Menurut Abdullah dan Rahman (2020), stewardship dalam sektor publik menekankan bahwa pejabat pemerintah bertindak sebagai pihak yang dipercaya untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah demi kesejahteraan publik.

Hal ini sejalan dengan pandangan Pratama dan Sari (2021) yang menyatakan bahwa dorongan intrinsik dan nilai prososial aparatur pemerintah berperan penting dalam memastikan penyajian laporan keuangan yang jujur, transparan, dan sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku. Widodo (2022) juga menekankan bahwa Stewardship Theory menggambarkan pemerintah sebagai pengemban amanah yang wajib mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran melalui laporan keuangan yang disusun secara efektif, efisien, serta sesuai ketentuan regulasi. Dalam konteks penelitian ini,

Stewardship Theory menjadi dasar untuk memahami bagaimana kepatuhan pemerintah daerah terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mencerminkan komitmen pemerintah Kota Pematang Siantar dalam mengelola keuangan daerah secara bertanggung jawab. Dengan demikian, penerapan SAP tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga bentuk konkret perilaku stewardship dalam memenuhi tuntutan akuntabilitas, transparansi, serta tata kelola pemerintahan yang baik (Umam & Setiyowati, 2023).



Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan instrumen utama dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik. Dalam perspektif akuntansi sektor publik, laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif, tetapi juga sebagai sarana evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah harus mampu menyajikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan, sebagaimana ditegaskan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan pemerintah daerah disusun menggunakan basis akrual yang memungkinkan pengakuan seluruh hak dan kewajiban ekonomi pemerintah secara lebih komprehensif. Penerapan basis akrual memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai posisi keuangan, kinerja operasional, serta kemampuan fiskal pemerintah daerah. Melalui laporan seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), pengguna laporan dapat menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola pendapatan, mengendalikan belanja, serta menjaga keseimbangan fiskal.

Dalam konteks kinerja keuangan daerah, laporan keuangan menjadi dasar untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, dan kemandirian fiskal. Efektivitas tercermin dari kemampuan pemerintah daerah merealisasikan pendapatan sesuai target yang telah ditetapkan dalam APBD, sedangkan efisiensi menggambarkan sejauh mana belanja daerah dikelola secara optimal tanpa pemborosan sumber daya. Sementara itu, kemandirian fiskal menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan operasional dan pembangunan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa ketergantungan yang berlebihan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Lebih lanjut, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan. Penerapan SAP yang konsisten tidak hanya meningkatkan kualitas informasi keuangan, tetapi juga memperkuat fungsi laporan keuangan sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Namun, kepatuhan terhadap SAP secara normatif belum tentu secara otomatis mencerminkan kinerja keuangan yang baik apabila tidak diiringi dengan perencanaan anggaran yang realistis, pengendalian belanja yang efektif, serta optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah daerah harus dipahami tidak hanya sebagai produk akhir dari proses akuntansi, tetapi sebagai bagian integral dari sistem tata kelola keuangan daerah yang berorientasi pada prinsip good governance. Analisis laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAP memungkinkan penilaian yang lebih objektif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Rasio Efektivitas, Efisiensi, dan Kemandirian Fiskal Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan. Rasio efisiensi menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggunakan sumber daya keuangan secara optimal. Sementara itu, rasio kemandirian fiskal menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Standar Akuntansi Pemerintahan Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. SAP bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja keuangan daerah.

Dalam buku Purwanti (2022:44) mengemukakan bahwa efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Syam (2020:130) dalam artikel jurnalnya mengemukakan efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output (keluaran) yang dicapai dengan output yang diharapkan dari jumlah input (masukan) dalam suatu perusahaan atau seseorang. Teori efektivitas berorientasi pada pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks organisasi sektor publik, efektivitas mencerminkan sejauh mana suatu entitas pemerintah mampu merealisasikan program, kegiatan, serta target keuangan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan dan anggaran. Rasio Efektivitas dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Menurut Mahmudi (2016) dan Permendagri No. 13 Tahun 2006, tingkat efektivitas dapat dikategorikan sebagai berikut:

- >100% : Sangat Efektif
- 90-100% : Efektif
- 80-90% : Efektif
- 60-80% : kurang Efektif
- <60% : Tidak Efektif

Menurut Mahmudi (2016), efisiensi mencerminkan hubungan antara input (sumber daya yang digunakan) dengan output (hasil yang diperoleh). Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan biaya yang serendah-rendahnya, atau sebaliknya, dapat menghasilkan output yang lebih besar dengan sumber daya yang sama.

Teori efisiensi merupakan konsep yang berkaitan dengan kemampuan suatu organisasi dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal dengan biaya atau input yang minimal. Dalam konteks sektor publik, efisiensi menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana pemerintah mampu melaksanakan kegiatan dan programnya dengan penggunaan anggaran yang hemat, tepat sasaran, dan tidak terjadi pemborosan sumber daya (Asri, 2022) .

Rasio Efisiensi laporan keuangan dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Semakin kecil nilai rasio efisiensi, maka semakin efisien pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Kriteria umum penilaiannya sebagai berikut (Mahmudi, 2016):

- < 60% → Sangat Efisien
- 60% – 80% → Efisien
- 80% – 90% → Cukup Efisien
- 90% – 100% → Kurang Efisien
- 100% → Tidak Efisien

Menurut Mahmudi (2016), kemandirian fiskal mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membiayai kegiatan pemerintah daerah melalui pajak dan retribusi daerah. Daerah yang mandiri secara fiskal memiliki kemampuan yang baik dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerahnya, seperti pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain. Sebaliknya, rendahnya kemandirian fiskal menunjukkan tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat atau provinsi, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap danaeksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dana eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Pemerintah Daerah masih belum mampu secara mandiri membiayai kegiatan pemerintahan dalam hal pelayanan kepadamasyarakat, kemudian ini juga berarti bahwa peran aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan di daerah adalah masih sangat rendah, yang dalam hal ini berupa kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi (Melina Febi Awani, 2021).

Rasio kemandirian fiskal dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio kemandirian fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Nilai rasio kemandirian fiskal menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah. Menurut Mahmudi (2016) dan Halim (2018), interpretasi umum tingkat kemandirian fiskal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 0% – 25% → Tingkat kemandirian sangat rendah
- 25% – 50% → Tingkat kemandirian rendah
- 50% – 75% → Tingkat kemandirian sedang
- 75% → Tingkat kemandirian tinggi

Penelitian mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kaitannya dengan kualitas serta kinerja laporan keuangan pemerintah daerah telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Miswati Gultom, Anggiat Sinurat, dan Darwin Damanik (2020) meneliti kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pematangsiantar dan menemukan bahwa pertumbuhan PAD bersifat fluktuatif, dengan tingkat efektivitas yang tergolong sangat efektif pada beberapa tahun pengamatan, namun efisiensi pengelolaan PAD masih berada pada kategori kurang efisien. Penelitian ini memberikan gambaran awal mengenai kinerja pendapatan daerah, tetapi belum mengaitkannya secara langsung dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Selanjutnya, Roisatul Aminy, Endar Pituringsih, dan Erna Widiastuty (2021) menunjukkan bahwa penerapan SAP dan sistem akuntansi instansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sementara prinsip good governance tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara parsial. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Jusmani, Edduar Hendri, dan Tomi Bayu Kurniawan (2022) yang menyimpulkan bahwa penerapan SAP memberikan pengaruh positif terhadap kualitas penyajian laporan



keuangan pemerintah daerah, meskipun masih terdapat kendala teknis dalam implementasinya.

Penelitian-penelitian lain juga menegaskan pentingnya SAP dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Fransiska Tirza Lantu, Royke I. J. Pangkey, dan Olviane Sumampouw (2023), serta Yunisa Rahma Arifiyanti (2023), menemukan bahwa penerapan SAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, baik secara parsial maupun simultan dengan variabel pendukung lainnya. Namun demikian, penelitian Jos Martin Simanjuntak, Eva Sriwiyanti, dan Wico Jontarudi Tarigan (2023) mengungkapkan bahwa meskipun SAP berbasis akrual telah diterapkan sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010, masih terdapat ketidaklengkapan dalam penyajian beberapa komponen laporan keuangan, seperti laporan arus kas dan saldo anggaran lebih, sehingga kualitas laporan keuangan belum sepenuhnya optimal.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian menekankan pengaruh positif penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, penelitian sebelumnya umumnya masih berfokus pada aspek kualitas pelaporan atau kinerja pendapatan secara parsial dan belum mengkaji secara komprehensif keterkaitan antara kepatuhan terhadap SAP dengan efektivitas, efisiensi, dan kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melengkapi dan memperluas kajian dengan menganalisis laporan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar secara menyeluruh berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Objek penelitian adalah laporan keuangan Pemerintah Kota Pematang Siantar periode 2020–2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diperoleh dari publikasi resmi pemerintah daerah. Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio kemandirian fiskal, serta analisis kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Pematang Siantar periode 2020–2024 masih menghadapi berbagai tantangan meskipun laporan keuangan telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hasil analisis mengungkapkan bahwa realisasi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami fluktuasi dan belum stabil, dengan penurunan signifikan pada tahun 2024 yang tidak sejalan dengan peningkatan target PAD. Kondisi ini mencerminkan rendahnya konsistensi dan efektivitas dalam pengelolaan pendapatan daerah. Selain itu, hampir seluruh periode penelitian menunjukkan terjadinya defisit anggaran, yang mengindikasikan bahwa belanja daerah belum sepenuhnya dikelola secara efisien dan belum disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Dari sisi kemandirian keuangan, Pemerintah Kota Pematang Siantar masih menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Meskipun secara umum penerapan SAP telah dilaksanakan sesuai ketentuan PP Nomor 71 Tahun 2010, hasil penelitian menemukan bahwa kepatuhan terhadap SAP belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan SAP perlu diiringi dengan perbaikan perencanaan pendapatan, pengendalian belanja, serta optimalisasi PAD agar kinerja keuangan daerah menjadi lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Melaporkan Hasil Penelitian

Sebagai entitas pelaporan, Pemerintah Kota Pematang Siantar memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam satu periode anggaran. Laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menerapkan basis akrual dalam pengakuan dan pencatatan transaksi keuangan pemerintah.

Sebagai entitas pelaporan, Pemerintah Kota Pematang Siantar memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam satu periode anggaran. Laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menerapkan basis akrual dalam pengakuan dan pencatatan transaksi keuangan pemerintah.

Anda dapat mengasumsikan bahwa pembaca memiliki pengetahuan dasar tentang statistik dasar (yaitu, biasanya konten yang tercakup dalam kursus statistik pertama). Oleh karena itu, tidak perlu membahas prosedur statistik dasar secara mendetail. Namun, Anda mungkin harus menjelaskan metode statistik multivariat tingkat lanjut (misalnya, ANOVA tindakan berulang, ANOVA dua atau satu arah, analisis regresi berganda, dan analisis faktor) dalam istilah-istilah teknis. Gambar dan Tabel (terpisah dari bagian utama naskah) sering kali memungkinkan seseorang untuk menyajikan temuan dengan cara yang jelas dan ringkas.

Tabel 1 Rasio Efektivitas Kota Pematang Siantar Periode 202-2024

| Tahun Anggaran | Anggaran Pendapatan Daerah | Realisasi Anggaran Pendapatan | Rasio Efektivitas | Kriteria Efektivitas |
|----------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|
| 2020 | 890.250.000.000,00 | 955.620.000.000,00 | 93,16% | Efektif |
| 2021 | 887.919.840.742,00 | 649.541.286.501,18 | 73,15% | Kurang Efektif |
| 2022 | 963.762.818.022,00 | 939.644.478.550,33 | 97,49% | Efektif |
| 2023 | 967.665.805.633,00 | 957.576.362.303,14 | 98,96% | Efektif |
| 2024 | 1.009.544.501.209,00 | 970.852.477.315,74 | 96,17% | Efektif |

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pematang Siantar Tahun 2020–2024

Berdasarkan tabel 1, hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Pematang Siantar selama periode 2020–2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, rasio efektivitas berada pada kategori efektif, yang menunjukkan bahwa realisasi PAD hampir mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan yang signifikan hingga berada pada kategori kurang efektif. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi pendapatan daerah. Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Daerah Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Pematang Siantar selama periode 2020–2024, diketahui bahwa kinerja pengelolaan pendapatan daerah menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Pada tahun 2020, rasio efektivitas sebesar 93,16% menunjukkan bahwa realisasi PAD hampir mencapai target yang ditetapkan dan dikategorikan efektif. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan signifikan menjadi 73,15% yang menempatkan kinerja pendapatan pada kategori kurang efektif. Penurunan ini

dapat dikaitkan dengan melemahnya aktivitas ekonomi daerah serta dampak lanjutan pandemi COVID-19 yang memengaruhi kemampuan masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi makro memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD. Pada periode 2022–2024, rasio efektivitas kembali meningkat dan berada pada kategori efektif, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam perencanaan pendapatan serta optimalisasi sumber-sumber PAD. Pada periode selanjutnya, yaitu tahun 2022 hingga 2024, rasio efektivitas kembali mengalami peningkatan dan berada pada kategori efektif, masing-masing sebesar 97,49%, 98,96%, dan 96,17%. Kondisi ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah, serta meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber PAD. Ditinjau dari perspektif Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), capaian ini menunjukkan bahwa informasi perencanaan dan realisasi pendapatan yang disajikan dalam laporan keuangan telah memenuhi prinsip relevansi dan keandalan, meskipun konsistensi pencapaian target masih perlu ditingkatkan.

Ditinjau dari perspektif Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kondisi ini mencerminkan bahwa penyajian informasi pendapatan dalam laporan keuangan telah memenuhi prinsip relevansi dan keandalan. Namun demikian, fluktuasi efektivitas menunjukkan bahwa kualitas perencanaan anggaran masih perlu ditingkatkan agar target pendapatan lebih realistis dan konsisten.

Tabel 2 Rasio Efisiensi Kota Pematang Siantar Periode 2020-2024

| Tahun Anggaran | Realisasi Belanja Daerah | Realisasi Anggaran Pendapatan | Rasio Efisiensi | Kriteria Efisiensi |
|----------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|
| 2020 | 911.990.000.000,00 | 955.620.000.000,00 | 95,43% | Kurang Efisien |
| 2021 | 782.370.178.468,38 | 649.541.286.501,18 | 120,44% | Tidak Efisien |
| 2022 | 885.629.154.464,00 | 939.644.478.550,33 | 94,25% | Kurang Efisien |
| 2023 | 992.102.953.093,00 | 957.576.362.303,14 | 103,60% | Tidak Efisien |
| 2024 | 989.494.205.388,99 | 970.852.477.315,74 | 101,92% | Tidak Efisien |

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pematang Siantar Tahun 2020–2024



Berdasarkan tabel 2 hasil analisis rasio efisiensi, pengelolaan belanja daerah Pemerintah Kota Pematang Siantar selama periode penelitian belum menunjukkan tingkat efisiensi yang optimal. Pada beberapa tahun, rasio efisiensi berada pada kategori kurang efisien, sedangkan pada tahun lainnya bahkan masuk dalam kategori tidak efisien. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah cenderung lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh.

Efisiensi Pengelolaan Belanja Daerah Hasil analisis rasio efisiensi keuangan daerah menunjukkan bahwa pengelolaan belanja Pemerintah Kota Pematang Siantar selama periode 2020– 2024 belum sepenuhnya efisien. Pada tahun 2020 dan 2022, rasio efisiensi masing-masing sebesar 95,43% dan 94,25% yang dikategorikan kurang efisien. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah masih relatif besar dibandingkan pendapatan yang diperoleh, meskipun masih berada dalam batas yang dapat dikendalikan.

Sementara itu, pada tahun 2021, 2023, dan 2024, rasio efisiensi masing-masing tercatat sebesar 120,44%, 103,60%, dan 101,92% sehingga dikategorikan tidak efisien. Kondisi ini mencerminkan bahwa realisasi belanja daerah melebihi realisasi pendapatan daerah, yang berpotensi menimbulkan tekanan fiskal dan defisit anggaran. Dari sudut pandang SAP, meskipun laporan keuangan telah disusun sesuai dengan ketentuan PP Nomor 71 Tahun 2010, tingginya rasio efisiensi menunjukkan bahwa penerapan SAP masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya mampu mendorong pengelolaan belanja yang efisien dan berorientasi pada kinerja.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perencanaan dan pengendalian belanja daerah belum sepenuhnya berorientasi pada prinsip efisiensi. Tingginya belanja daerah yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan berpotensi menimbulkan tekanan fiskal serta mengurangi fleksibilitas keuangan daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa tingginya rasio belanja daerah mencerminkan lemahnya pengendalian anggaran dan rendahnya efektivitas kebijakan fiskal daerah.

Dalam konteks penerapan SAP, meskipun laporan keuangan telah disusun sesuai dengan ketentuan PP Nomor 71 Tahun 2010, hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong pengelolaan belanja yang efisien. Dengan demikian, diperlukan penguatan fungsi perencanaan dan evaluasi anggaran agar belanja daerah lebih berorientasi pada kinerja dan hasil.

Tabel 3 Rasio Kemandirian Fiska Kota Pematang Siantar Periode 2020-2024

| Tahun Anggaran | PAD Pendapatan Asli Daerah | Anggaran Pendapatan Daerah | Rasio Kemandirian | Kriteria Kemandirian |
|----------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|
| 2020 | 118.950.000.000 | | 12,44% | Sangat Rendah |
| 2021 | 115.860.000.000 | | 13,04% | Sangat Rendah |
| 2022 | 136.070.000.000 | 963.762.818.022,00 | 14,115 | Sangat Rendah |
| 2023 | 163.350.000.000 | 967.665.805.633,00 | 16,88% | Sangat Rendah |
| 2024 | 171.780.000.000 | 1.009.544.501.209,00 | 17,01% | Sangat Rendah |

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pematang Siantar Tahun 2020–2024

Berdasarkan tabel 3, hasil analisis rasio kemandirian fiskal menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Pemerintah Kota Pematang Siantar selama periode 2020–2024 masih berada pada kategori sangat rendah, meskipun menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Rendahnya rasio kemandirian fiskal mencerminkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih terbatas.

Kemandirian Fiskal Daerah Berdasarkan hasil analisis rasio kemandirian fiskal, Pemerintah Kota Pematang Siantar selama periode 2020–2024 masih berada pada kategori sangat rendah. Rasio kemandirian fiskal meningkat secara bertahap dari 12,44% pada tahun 2020 menjadi 17,01% pada tahun 2024. Meskipun menunjukkan tren peningkatan, capaian tersebut tetap mengindikasikan tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.

Tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri masih belum optimal. Kondisi ini sejalan dengan teori keuangan daerah yang menyatakan bahwa rendahnya kemandirian fiskal menjadi indikator lemahnya kapasitas fiskal daerah dalam mendukung otonomi daerah.

Dalam perspektif SAP, rendahnya kemandirian fiskal mengindikasikan bahwa meskipun penyajian laporan keuangan telah memenuhi standar akuntansi secara formal, tujuan substantif pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan kemandirian dan akuntabilitas fiskal belum sepenuhnya tercapai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pada bagian ini, penulis menyajikan kesimpulan singkat dari hasil penelitian dengan saran untuk Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan Pemerintah Kota Pematang Siantar periode 2020–2024 yang ditinjau dari Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dapat disimpulkan bahwa penerapan SAP secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PP Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan telah disusun secara sistematis dan mencakup komponen utama laporan keuangan pemerintah daerah. Namun demikian, penerapan SAP tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kinerja keuangan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode penelitian mengalami fluktuasi dan cenderung menurun pada tahun terakhir pengamatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum mampu mengoptimalkan potensi PAD secara konsisten, meskipun target pendapatan terus meningkat. Selain itu, rasio efisiensi menunjukkan bahwa pengelolaan belanja daerah masih belum optimal, yang tercermin dari terjadinya defisit anggaran pada sebagian besar periode penelitian.

Dari sisi kemandirian fiskal, Pemerintah Kota Pematang Siantar masih menunjukkan tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini menandakan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih relatif rendah, sehingga kemandirian keuangan daerah belum tercapai secara maksimal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun laporan keuangan telah disusun sesuai SAP, efektivitas, efisiensi, dan kemandirian keuangan daerah masih perlu ditingkatkan melalui perbaikan perencanaan pendapatan, pengendalian belanja, serta optimalisasi sumber-sumber PAD.

Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah
Pemerintah Kota Pematang Siantar disarankan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemetaan potensi pendapatan yang lebih akurat serta optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD. Selain itu, diperlukan penguatan pengendalian belanja daerah agar penyusunan anggaran lebih selaras dengan kemampuan fiskal daerah, sehingga dapat menekan terjadinya defisit anggaran secara berulang.
2. Bagi Pengelola Keuangan Daerah
Aparatur pengelola keuangan daerah diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan konsistensi dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), tidak hanya dalam aspek teknis penyusunan laporan keuangan, tetapi juga dalam menjadikan laporan keuangan sebagai alat evaluasi efektivitas, efisiensi, dan kemandirian keuangan daerah. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan teknis secara berkelanjutan menjadi hal yang penting untuk mendukung kualitas pelaporan keuangan.
3. Bagi Lembaga Pengawasan
Lembaga pengawasan, khususnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan inspektorat daerah, diharapkan dapat memperkuat fungsi pembinaan dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penekanan tidak hanya pada kepatuhan terhadap standar akuntansi, tetapi juga pada peningkatan kinerja keuangan daerah secara substantif, terutama dalam aspek efektivitas dan efisiensi anggaran.



4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek dan periode penelitian, serta menambahkan variabel lain seperti sistem pengendalian internal, kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan good governance. Pendekatan kuantitatif yang dikombinasikan dengan analisis kualitatif juga dapat digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi, P., & Literatur, S. (2024). Karimah Tauhid, Volume 3 Nomor 4 (2024), e-ISSN 2963- 590X. 3, 4716–4734.
- Asri, D. (2022). Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 11(1), 130–138.
- Daerah, K., Nias, K., Studi, U., Kabupaten, B., & Utara, N. (2025). Economics and Digital Business Review Analisis Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan. 7(1), 361–379.
- Damanik, I. M., Juzilam, S., & Situmeang, C. (2025). OPEN GOVERNMENT FRAMEWORK AND PERFORMANCE: AN INTERACTION APPROACH WITHIN THE CONCEPT OF ENTERPRISE RISK MANAGEMENT FOR LOCAL GOVERNMENTS IN INDONESIA. *Lex Localis: Journal of Local Self-Government*, 23(11).
- Dan, N., Agam, K., Hafizah, T. Z., Y, F. D., A, S. V., & Azzahra, N. (2024). ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR. 1(4), 274–281.
- Gultom, M., Sinurat, A., & Damanik, D. (2020). PEMATANGSIANTAR Oleh : 2(1), 12–17.
- Irawan, I., Muda, I., Juzilam, S., & Situmeang, C. (2026). Open Government Framework Model to Performance for Local Governments in Indonesia. In *The Future of Work: How Technology is Transforming Jobs and Skills* (pp. 675-684). Cham: Springer Nature Switzerland.
- Irawan, I. R. N., & Sani, A. ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY OF DISTRICT FINANCIAL REPORTS.
- Jos Martin Simanjuntak, Eva Sriwiyanti, Wico Jontarudi Tarigan. (2023). *Jurnal Ilmiah AccUsi* Jurnal Ilmiah AccUsi. 5(1), 25–45.
- Lita, L. H. G., Syahputri, A., Niswa, K., & Harnia, A. (2025). MODEL GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN. *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 8(1), 1-12.
- Mamonto, S. F., & Dewi, M. P. (2025). Evaluasi Tata Kelola Kebijakan Daerah dalam Mewujudkan Pemerintahan Good Governance di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. 10(11).
- Maria, & Son, E. (n.d.). PENGARUH KEPUASAN KERJA , SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ,.
- Mumu, P., Kalangi, L., Kapojos, P. M., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Bisnis, D., Ratulangi, U. S., & Kampus, J. (2023). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI pada Laporan Keuangan Daerah Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa Analysis of the Implementation of Accrual-Based Government Accounting Standards (SAP) in the Financial Statements of Langowan Barat District , Minahasa Regency. 7(3), 105–114.

Umam, M. S., & Setiyowati, A. D. (2023). Pengaruh Akuntabilitas , Transparansi , Komitmen Aparatur , Kepatuhan Pada Regulasi Terhadap Kinerja Aparatur Daerah The Effect of Accountability , Transparency Apparatus Commitment , and Compliance with Regulations on Regional Apparatus Performance. 19(1), 91–102.

Wibisono, A. F., & Akuntansi, P. S. (2024). 1 , 2 1,2. 3, 979–986. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i3.236>